

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desentralisasi dan Pilkades

Pada tahun 1998 merupakan sebuah awal perubahan dari sistem politik di Indonesia. Pada saat itu ada dua isu perubahan yang pertama yakni dalam politik dan yang kedua dalam ekonomi. Suatu perubahan akibat adanya reformasi yakni mulai terbukanya ruang publik, serta terdapat tuntutan daerah untuk ikut andil dalam pengelolaan daerahnya atau yang sering disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi dipandang sebagai strategi penting dalam rangka memperkuat demokratisasi. Salahsatu implementasi dari demokrasi yakni adanya sebuah pemilihan umum. Wolhoff mendefinisikan pemilihan umum sebagai sebuah mekanisme untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan yang dimandatkan oleh masyarakat. (Jurdi, 2018)

Di Indonesia, pemilihan umum menjadi suatu hal yang sangat penting yang bertujuan untuk menyalurkan kehendak politik bangsa. Indonesia sudah mengenal pemilu yakni sejak tahun 1955 sampai yang terakhir tahun 2019 lalu. Sebagai sebuah perwujudan dari demokrasi, maka pemilihan kepala desa atau yang sering disebut Pilkades bukan lagi suatu hal yang baru di dalam kehidupan desa. Jika ditinjau dari aspek sejarah, pemilihan yang diselenggarakan di tingkat desa sudah diperkenalkan oleh Raffles yakni pada awal abad ke-19 atau sekitar tahun 1811-1816. Pemilihan kepala desa merupakan bagian terpenting untuk menyelesaikan ketegangan politik-ekonomi yang terjadi di pedesaan. Sedangkan dari aspek

yuridis, perkembangan demokrasi desa pada awal kemerdekaan dimulai sejak adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 sampai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965. Pada masa itu, desa belum menjadi daerah yang benar-benar otonom yang memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri. Situasi politik pada saat itu masih dalam suasana revolusi dan masih terjadinya pemberontakan di daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 21 menyebutkan bahwa syarat menjadi kepala desa yaitu :

- 1) Warga negara Republik Indonesia;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; - 5 -
- 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- 6) Bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- 7) Dihapus;
- 8) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- 9) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- 10) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) Berbadan sehat;
- 12) Tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- 13) Syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah.

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Proses kampanye dalam pemilihan umum dinilai sangat penting, karena berfungsi sebagai sarana partisipasi warga negara dan bentuk dari pendidikan politik. Kampanye dilakukan bertujuan untuk membangun komitmen antara warga negara dengan calon pemimpin melalui visi, misi, program, atau informasi lainnya yang ditawarkan dalam upaya meyakinkan dan mendapat dukungan sebesar-besarnya dari pemilih. Sama halnya dalam pemilihan kepala desa juga terdapat serangkaian proses kampanye. Kampanye yang dilakukan oleh calon kepala desa harus sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kampanye yaitu:

- 1) Gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dan sebagainya)

- 2) Sebuah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya yang bertujuan untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara.

Dari beberapa pengertian tentang kampanye yang telah dijelaskan, secara sederhana kampanye dapat diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh calon elit politik untuk memengaruhi khalayak dengan menawarkan visi, misi, serta berbagai bentuk program kerja yang kemudian diharapkan mampu mendapatkan dukungan. Proses kampanye yang sering dilakukan yakni berupa penyampaian visi, misi, dan program kerja. Kegiatan dialog atau debat publik termasuk kedalam evaluasi kampanye. Tahapan terakhir dari kampanye yakni melakukan evaluasi kampanye untuk mendapatkan efek kampanye dari sasaran khalayak.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa terdapat panitia pemilihan Kepala Desa yang bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa yang terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Adapun terkait biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Semua calon kepala desa serentak melakukan kampanye sebelum proses pemungutan suara tiba. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Hal mutlak dalam setiap pemilihan umum tidak terkecuali pemilihan kepala desa yakni ada yang memilih dan ada yang dipilih. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam Pemilihan Kepala Desa, peran serta masyarakat dianggap sebagai

wujud dari kehidupan berdemokrasi ditingkat terendah. Dengan adanya pengalaman mengenai pemilihan umum Presiden, Gubernur ataupun Bupati diharapkan mampu menjadikan masyarakat berfikir rasional dalam memilih. Secara formal dan prosedural Pemilihan Kepala Desa dapat terselenggara secara tertib dan aman, akan tetapi tidak secara otomatis berlangsung dengan jujur, adil dan berkualitas. Hal tersebut dikarenakan oleh seberapa besar partisipasi masyarakat yang disalurkan serta kualitas partisipasi itu sendiri dalam menentukan calon yang dipilih. Panitia Pemilihan Kepala Desa juga berperan penting dalam menyiapkan pelaksanaan demokrasi ini. Dari awal pendataan calon pemilih, penjaringan bakal calon kepala desa, melaksanakan pemungutan suara, menghitung perolehan suara, dan melaporkan seluruh hasil Pemilihan Kepala Desa. Panitia juga bertugas untuk mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh masing-masing kandidat.

2.2 Oligarki

Disamping reformasi menghadirkan sebuah kebebasan dan keadilan, reformasi juga membawa sisi negative diantaranya marak praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) serta tumbuhnya politik dinasti. Hal yang paling menonjol dari desentralisasi yakni tumbuhnya praktik politik oligarki yang menyebar sampai ke daerah. Desentralisasi dan politik elektoral langsung sering dimanfaatkan oleh para elit kuat lokal. Mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperebutkan kekuasaan demi mempertahankan bahkan memperluas kekayaan. Winters menyebutnya sebagai oligarki, yakni sebuah politik pertahanan kekayaan yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material. Dengan memakai makna bahwa oligarki adalah sebuah politik pertahanan kekayaan melalui aktor

yang memiliki material berlimpah, analisis Winters tertuju pada individu yang bersifat kolektif atau tidak. Kaum oligark dapat memilih untuk mendukung, membiayai, atau bahkan menjadi elite politik tersendiri. Hal tersebut berarti tidak semua pelaku oligark terlibat langsung dalam dalam ranah politik langsung. (Ford dan Pepinsky, 2014).

Dalam memahami arti dari oligarki, maka hal pertama yang perlu diketahui yakni definisi dari oligark. Menurut Winters, oligark (*oligarch*) yakni pelaku yang menguasai sumber daya material yang digunakan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi social. (Winters, 2011). Dalam konsep oligark ada tiga hal yang memiliki keterkaitan. *Pertama*, adalah kekayaan sebagai bentuk kekuasaan material. *Kedua*, penguasaan dan pengendalian terhadap kekayaan itu sendiri yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Dan yang *ketiga*, definisi oligarki tetap konstan dalam berbagai zaman dan kasus. Dengan adanya definisi oligark, maka oligarki bisa di definisikan. Robison dan Hadiz melihat oligarki sebagai sebuah sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan. (Ford dan Pepinsky, 2014). Leach mendefinisikan oligarki sebagai sebuah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan minoritas. Artinya, sesuatu yang dikehendaki oleh minoritas tersebut maka hal itu pula yang akan terjadi. Sementara Winters menjelaskan bahwa oligarki merupakan politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material. (Winters, 2011).

Secara sederhana, oligarki dapat di definisikan sebagai sebuah bentuk pertahanan yang dilakukan oleh pihak elit politik yang memiliki kekayaan berlebih.

Oligarki dapat dibedakan menurut kekayaan, kekuasaan, keluarga, bahkan militer. Dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan terhadap oligarki kekuasaan dan keluarga.

a. Tipe-Tipe Oligarki

- 1) Oligarki Panglima, Semakin banyak penaklukan maka akan semakin kaya. Pemaksa tercipta untuk pertahanan kekayaan dan kekayaan digunakan untuk memelihara kapasitas pemaksa.
- 2) Penguasa Kolektif, para oligarki masih menggunakan kekerasan tetapi mereka bergabung dalam satu lembaga kolektif yang memiliki norma. Sama halnya dengan oligarki panglima, oligarki penguasa kolektif juga masih tidak stabil.
- 3) Oligarki Sultanistik tercipta ketika monopoli kekuasaan berada ditangan satu oligarki, bukan berada dalam negara yang dibatasi oleh hukum. Didalamnya sering terjadi hubungan patron-klien dengan norma perilaku dan kewajiban yang terkait.
- 4) Oligarki Sipil, oligarki ini sama sekali tidak menggunakan senjata dan tidak berkuasa secara langsung. Didalamnya, para oligarki menyerahkan kekuasaan mereka kepada pemerintah, dimana dalam hal ini hukum lebih kuat daripada individu.
- 5) Oligarki Jinak dan Liar, kejinakan suatu oligarki merujuk kepada kuatnya sistem pengendalian tingkah laku oligarki dengan menerapkan biaya atas perilaku social oligarki yang paling merugikan. (Winters, 2011).

2.3 Kekuasaan

2.3.1 Pengertian Kekuasaan

Miriam Budiardjo mengungkapkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seorang untuk memengaruhi oranglain untuk melakukan tindakan yang dikehendaki atau di perintahkan. (Budiardjo, 2017).

Teori kekuasaan satu dimensi melihat kekuasaan dengan melihat pada satu sisi yakni tindakan aktor dalam mengambil suatu keputusan. Aspek ini menjadi satu-satunya unsur yang dilihat oleh teori satu dimensi dalam melihat kekuasaan. Bagi Lukes, teori dua dimensi dalam memandang kekuasaan mengarah kepada aspek yang lebih luas yakni kekuasaan berjalan bukan hanya pada level pengambilan keputusan, tetapi juga diluar itu. Teori ini mendasarkan dirinya pada paham tindakan (*behaviorisme*) dalam memandang kekuasaan.

Lukes menyebutkan bahwa teori kekuasaan yang lama, baik satu dimensi atau dua dimensi sudah tidak memadai untuk membaca fenomena kekuasaan. Maka dari itu Lukes menawarkan teori Tiga Dimensi yang mengkritik *Behaviorisme*. Teori Tiga Dimensi ini melihat serta memperhatikan pmbutan kebijakan dalam agenda politik serta melihat kontrol terhadap agenda tersebut. Teori ini menambahkan satu hal sebagai analisis kritiknya yakni konflik terbuka maupun konflik tertutup dalam kekuasaan. Kritik kekuasaan harus meliputi kepentingan subyektif ataupun obyektif.

Dengan adanya teori Tiga Dimensi ini mendorong Gaventa untuk merumuskan Teori *Powercube*, yakni kekuasaan terdiri dari tiga sisi yakni level, ruang, dan bentuk. Teori *Powercube* ini muncul untuk menganalisis kekuasaan.

Lahirnya teori ini bermula dari kekuasaan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia tetapi belum adanya sebuah kajian yang mendalam tentang kekuasaan itu sendiri. Teori ini memandang bahwa kekuasaan dipahami sebagai sebuah kontrol seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain atau terhadap kelompok lainnya. Kekuasaan menurut Gaventa memiliki tiga dimensi yakni :

- a. Dimensi level terdiri atas lokal, nasional, serta global.
- b. Dimensi ruang terdiri atas ruang tertutup, ruang yang diperkenankan, serta ruang yang diciptakan.
- c. Dimensi bentuk terdiri atas bentuk yang terlihat, bentuk tersembunyi, dan bentuk tidak terlihat.

Ketiga dimensi ini saling memiliki keterkaitan dan saling memengaruhi.

(Halim, 2018)

2.3.2 Sumber daya kekuasaan

Pendekatan sumber daya kekuasaan sangat penting karena berfungsi untuk memahami oligark dan oligarki. Oligark didefinisikan oleh tipe dan ukuran sumber daya kekuasaan yang dikendalikannya. Sudut pandang ini mengandalkan penilaian kapasitas kekuasaan pada tingkat individu, bukan kelompok. Semua individu dalam suatu formasi sosial memiliki kadar kekuasaan baik sekecil apapun. Dan yang harus dilakukan adalah menentukan jenis kekuasaan yang dimiliki individu dan memperkirakan kualitas relatifnya. Ada beberapa sumber daya kekuasaan terutama kekayaan yang lebih mudah diukur dan dibandingkan daripada yang lain. Secara teori, dapat dihitung profil kekuasaan individual untuk setiap pelaku dalam

masyarakat, kemudian tiap pelaku dirutkan secara kuantitatif dari yang tak berkuasa sampai yang paling berkuasa.

Gagasan profil kekuasaan individu hanya sebagai alat bantu untuk memusatkan perhatian kepada posisi kekuasaan relatif pelaku individual, bukan kelompok atau kelas. Metode ini sangat penting untuk menentukan siapakah oligark dan untuk membedakan mereka dari pelaku yang relatif berkuasa dan tak berkuasa di masyarakat. Kekuasaan individual dilihat berdasarkan hak politik, kekuasaan jabatan resmi dalam pemerintah atau organisasi, kekuasaan pemaksaan, kekuasaan mobilisasi, serta kekuasaan material.

Hak politik formal, yakni sumber daya kekuasaan yang sangat umum dan paling tersebar di tingkat individu. Hak yang dianggap kebebasan liberal mencakup satu suara untuk setiap orang, kebebasan berpendapat tanpa ditindas, dan kesempatan mendapat akses informasi yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Selain hak berkumpul dan berserikat, ada juga hal politik baru yang menjadi sangat penting antar individu kalau bersifat semakin eksklusif baik secara formal maupun praktik. Sejak lama, orang-orang telah disangkal hak serta keterlibatan politiknya berdasarkan status budak, ras, etnis, jenis kelamin, agama, geografi, serta kekayaan.

Jabatan resmi. Jabatan tinggi dalam pemerintahan ataupun organisasi besar yakni suatu sumber daya kekuasaan yang mempunyai pengaruh dramatis pada profil kekuasaan segelintir individu. Di zaman modern, organisasi-organisasi tersebut yakni sebuah badan yang berdasar pada aturan untuk mengonsentrasikan kekuasaan dengan cara menghimpun keuangan, pengelompokan anggota yang bisa

dilibatkan atau diperintah melalui kelembagaan. Kehilangan jabatan maka akan kehilangan kekuasaan pula.

Dalam membangun definisi tentang oligark dan oligarki, maka minoritas pelaku yang hanya memegang sumberdaya kekuasaan jabatan resmi adalah segelintir elit bukan oligark. Jabatan tinggi yang terpisah serta tidak terkait individu mampu dipegang tapi tidak untuk dimiliki. Mereka memiliki kelebihan kekuasaan yang terkait dengan jabatan yang mereka miliki selama mereka memegangnya. Satu hal yang sangat penting yakni apabila tidak lagi memegang jabatan, maka semua kekuasaan individu yang dimiliki akan hilang.

Kekuasaan pemaksaan. Sumber daya kekuasaan yakni salahsatu yang sukar untuk didefinisikan karena bersifat sebagai komponen profil kekuasaan individu yang telah berubah menjadi radikal seiring berjalannya waktu. Sebelum munculnya negara modern, kapasitas pemaksaan tersebar diantara banyak pelaku di masyarakat. Ketidakseimbangan dalam kapasitas individu melakukan kekerasan dimana kekuasaan pemaksaan sangat penting dalam profil kekuasaan individu dan berfungsi juga untuk membahas oligarki karena perubahan lokasi kekuasaan pemaksaan dari individu ke negara termasuk sumber terbesar perubahan hakikat oligarki dalam sejarah. Hal tersebut karena terdapat hubungan antara kekerasan, klaim harta, serta pertahanan kekayaan. Kekuasaan pemaksaan telah bergeser yang awalnya dari sumber daya kekuasaan yang penting didalam profil kekuasaan individual oligark menjadi satu bentuk kekuasaan elit di negara modern, dimana para pelaku mengelola kekerasan dalam lembaga resmi.

Kekuasaan mobilisasi, merujuk kepada kapasitas individu untuk menggerakkan atau memengaruhi orang lain seperti kemampuan memimpin, meyakinkan, menciptakan jejaring, menghidupkan gerakan, serta menginsiparsi orang lain untuk bertindak. Tidak hanya hal tersebut, kekuasaan mobilisasi juga merujuk kepada perubahan yang tak jarang tajam terhadap profil kekuasaan individual pelaku yang berada dalam keadaan mobilisasi pada periode tertentu. Dalam skala besar, beberapa pelaku sangat berkuasa hanya memiliki hak politik formal yang terbatas, tidak memegang jabatan resmi, tidak memiliki senjata, serta tidak memiliki kekayaan. Namun, mereka mampu menggunakan karisma pribadi, status, keberanian, serta gagasan untuk menggerakkan masa yang terdiri atas individu-individu yang biasanya tidak berdaya.

Kekuasaan mobilisasi disesuaikan dengan kadar hak politik formal. Aspek penting dalam kapasitas mobilisasi sebagai sumber daya kekuasaan khususnya dalam konteks analisis oligark dan kekuasaan oligarki yakni bahwa kapasitas mobilisasi memerlukan keterlibatan secara langsung yang cukup besar dan terus menerus oleh para pelaku yang terlibat supaya lebih efektif. Kekuasaan mobilisasi tidak bisa diwakilkan, sangat sulit dipertahankan, serta bergantung pada komitmen pribadi berupa waktu dan partisipasi.

Kekuasaan material. Kekayaan adalah sumber daya kekuasaan yang mendefinisikan oligark dan menggerakkan politik serta proses oligarki. Sumber daya kekuasaan material menyediakan sebuah dasar untuk tegaknya oligark sebagai pelaku politik yang tangguh. Sumber daya material terdapat dalam berbagai bentuk, tetapi yang paling sering kita jumpai dan mudah dikenali yakni berupa uang tunai.

Orang tidak akan berkuasa apabila tidak memiliki kekayaan. Tetapi demikian, orang masih bisa mendapatkan kekuasaan melalui sumber daya kekuasaan yang lainnya. Kekuasaan material mampu membeli pertahanan kekayaan baik dalam bentuk kemampuan pemaksaan atau sewa jasa pertahanan dari professional yang ahli.

Kekuasaan material sangat unik karena mempertahankan oligark untuk terus menerus membeli keterlibatan orang lain, yang dibutuhkan dalam hal ini yakni kompensasi material atas jasa. Oligark adalah satu-satunya golongan yang mampu mengejar tujuan politik pribadi secara tidak langsung dengan menggunakan pengaruh melalui para pekerja menengah dan atas yang bekerja sepanjang tahun sebagai pembela kepentingan utama oligarkis. Pekerjaan mereka yakni mencari kemenangan bagi oligark, saling bersaing untuk mendapat upah yang ditawarkan oligark untuk mempertahankan kekayaan serta pendapatan. (Winters, 2011).

2.3.3 Bentuk-Bentuk Kekuasaan Politik Lokal

Dalam praktik politik lokal daerah terdapat tiga bentuk kekuasaan, yaitu :

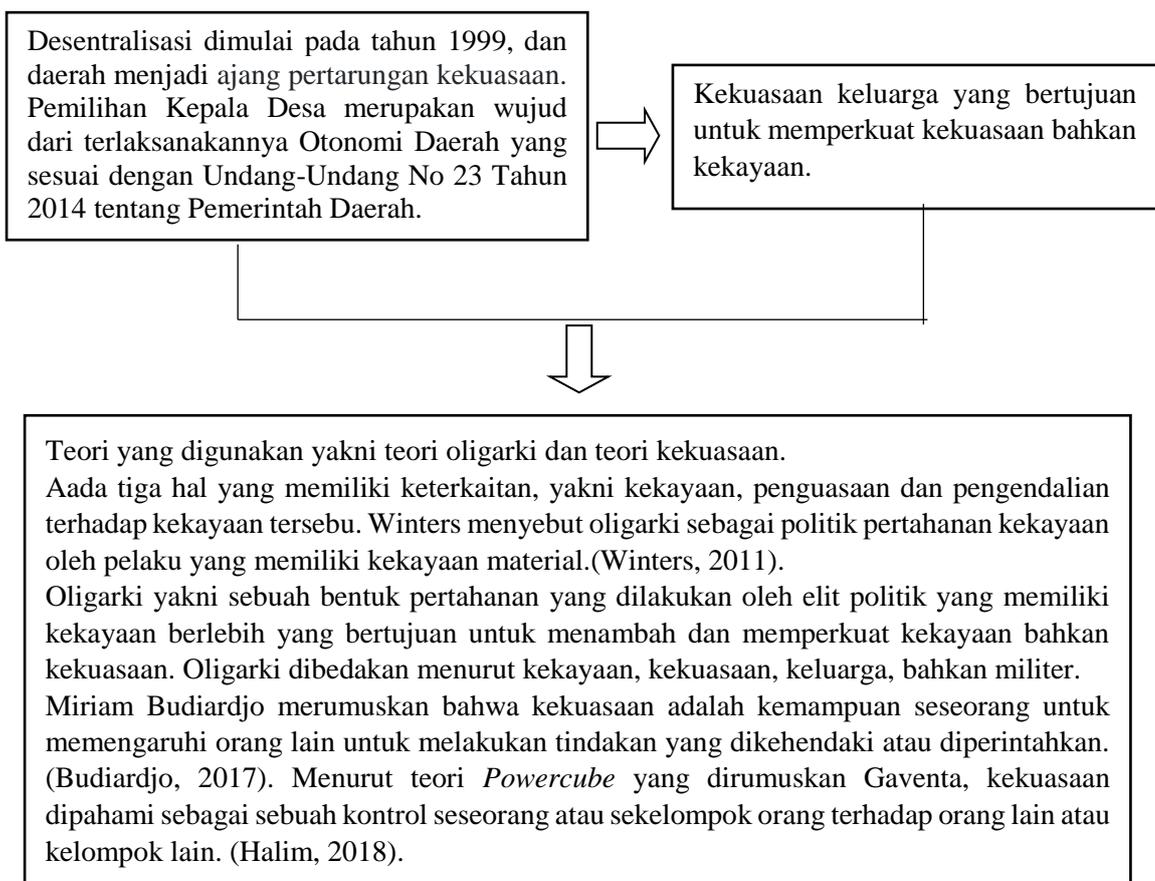
- a. Kekuasaan terlihat. Merupakan wujud di ruang publik atau lembaga pembuat kebijakan, misalnya lembaga legislatif. Sebagai pembuat kebijakan, maka didalamnya terdapat aktor pembuat kebijakan tersebut. Disamping itu, kekuasaan terlihat merupakan kontestasi antar aktor kekuasaan. Daerah menjadi ajang pertarungan kekuasaan terlebih ketika desentralisasi muncul. Pada saat musim pemilihan kepala daerah maka para calon dengan seluruh modal politik yang dimilikinya saling bertarung untuk memperebutkan simpati serta dukungan dari masyarakat. Pada saat itu pula

massa berjuang untuk saling menjatuhkan karena mereka berada dibawah pengaruh dan keinginannya sendiri. Secara tidak langsung, kegiatan tersebut merupakan bentuk kekuasaan yang terlihat di ruang publik.

- b. Kekuasaan Tersembunyi. Gaventa menyebut kekuasaan tersembunyi sebagai sebuah kekuatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal yang mendorong munculnya kekuasaan tersembunyi yakni adanya sebuah pertahanan kekuasaan dari kepentingan. Dalam konteks kekuasaan tersembunyi di daerah, maka aktor dan elite politik yang paling dominan adalah elit yang sedang berkuasa. Kekuasaan tersembunyi ini dimanfaatkan oleh elit politik untuk mempertahankan status quonya. Dengan kata lain, dinasti politik dapat berlangsung dengan mulus melalui kekuasaan tersembunyi.
- c. Kekuasaan yang Tidak Terlihat. Kekuasaan ini merupakan lanjutan dari kekuasaan tersembunyi. Namun demikian keduanya memiliki perbedaan. Dalam kekuasaan tersembunyi masyarakat masih bisa muncul untuk menyampaikan aspirasinya, namun lain halnya dalam kekuasaan tidak terlihat masyarakat sama sekali sudah kehilangan kesadaran karena terbius oleh nilai serta ideologi para penguasa. Penguasa dengan leluasa dapat mengelabui masyarakat melalui ideologi tanpa disadari. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk dari kekuasaan tidak terlihat. Contoh kecil dari kekuasaan yang tidak terlihat yakni proses demokrasi yang ada di daerah. Contohnya, minimnya partisipasi warga daerah terhadap proses pemilihan kepala daerah. Hal tersebut dipengaruhi oleh rayuan berupa ideologi.

Biasanya ideology berbasis agama yang memiliki pengaruh besar. Dalam praktik kekuasaan tidak terlihat pihak yang paling menonjol adalah elit agama, masyarakat, serta partai politik. Bukan tanpa alasan, elit-elit tersebut dinilai memiliki pengaruh besar untuk mengelabui masyarakat. Praktiknya lebih kepada hegemoni dan ideologi karena berkaitan dengan perilaku pemilih. Ketika masyarakat terbuai dengan kata-kata yang ideologis, religious, serta mendukung nilai tradisi maka tujuan murni politik sama sekali tidak terlihat. (Halim, 2018)

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

Desentralisasi telah membawa perubahan yang sangat fundamental, salahsatunya yakni terbukanya ruang publik, serta terdapat tuntutan daerah untuk ikut andil dalam pengambilan pengelolaan daerahnya. Pada awal terjadinya desentralisasi terjadinya ajang pertarungan kekuasaan di daerah. Untuk dapat menjalankan system pemerintahan yang ada di tingkat terendah yakni desa maka dibutuhkan seorang pemimpin atau yang dikenal dengan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan wujud dari terlaksanakannya Otonomi Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi yang ada pada setiap warga Indonesia. Pada tahun 2019 sebagian Desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan pilkades serentak tidak terkecuali Desa Hegarwangi. Usia kepala desa yang sekarang menjabat di Desa Hegarwangi memiliki usia yang masih muda dibandingkan dengan kepala desa yang sebelumnya pernah menjabat di Desa tersebut. Dengan usianya yang masih muda dan menjabat sebagai seorang pemimpin tentunya memiliki sisi positif dan negative, serta dianggap kurang meyakinkan masyarakat karena kurangnya pengalaman. Kemenangan kepala desa yang sekarang menjabat dipengaruhi oleh faktor pendukung dari luar yakni adanya praktik politik oligarki yang berkaitan dengan kekuasaan keluarga.

Penulis memperkuat analisis mengenai Oligarki Kemenangan Kandidat Kepala Desa Termuda Dalam Pemilihan Kepala Desa 2019 Di Desa Hegarwangi Kabupaten Tasikmalaya, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teori oligarki dan teori kekuasaan.